

**KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA
GUNUNG SEMERU**

Dr. Suhari,A.Per.Pen,MM



pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GUNUNG SEMERU

Penulis:

Dr. Suhari,A.Per.Pen,MM

ISBN : 978-623-315-883-1

Editor:

Wiwit Kurniawan

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Eka Safitry

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas

Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “**KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GUNUNG SEMERU**”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Dalam buku ini membahas dua hal, yaitu (1) mengeksplorasi dan mendeskripsikan implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang; (2) untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan dan jalur komunikasi bencana alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang kurang lancar dan sinergis sehingga menyebabkan masyarakat cenderung menggunakan pola-pola kearifan lokal dalam mitigasi bencana dibandingkan pola-pola modern karena pola kearifan lokal inilah yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat saat itu. Respon pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana di daerahnya masih kurang sigap dan lamban karena bantuan kepada para korban bencana Gunung Semeru tidak langsung datang saat bencana datang malah yang datang dahulu bantuannya berasal dari lembaga sosial yang ada di dalam maupun luar daerah Kabupaten Lumajang. Bahkan untuk bantuan-bantuan yang di janjikan pun belum ada realisasinya. Dan kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang tentang alokasi dan realisasi dana mitigasi bencana sangat minim padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Kebencanaan diamanahkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana APBD untuk bidang bencana alam.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kesadaran dan Upaya Pengurangan Risiko Bencana	1
B. Pelaksanaan Mitigasi Bencana	6
C. Potensi Bencana Wilayah Sekitar Gunung Semeru.....	9
BAB II KEBIJAKAN PUBLIK	20
A. Dinamika Paradigmatik Administrasi Publik	20
B. Konsep dan Teori Kebijakan Publik.....	30
C. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik	35
D. Model-model Implementasi Kebijakan	42
1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier (2008).....	42
2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle.....	45
3. Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III	46
4. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn.....	53
BAB III MITIGASI BENCANA GUNUNG BERAPI.....	59
A. Konsep Bencana Gunung Berapi.....	59
B. Manajemen Bencana (<i>Disaster Management</i>)	62
C. Kebijakan Mitigasi Bencana	67
1. Mitigasi Struktural	68

2. Mitigasi Non-Struktural	69
3. Tujuan Utama dari Mitigasi Bencana	70
D. Kebijakan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Lumajang.....	73
E. Program Desa Tangguh Bencana	80
BAB IV DESKRIPSI KABUPATEN LUMAJANG.....	86
A. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	86
1. Letak dan Keadaan Geografis	86
2. Keadaan Cuaca di Kabupaten Lumajang	90
3. Kependudukan Kabupaten Lumajang	92
B. Profil Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang	94
C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Mitigasi Bencana Gunung Semeru	100
1. Analisis Bencana Gunung Semeru Kabupaten Lumajang	100
2. Proses Mitigasi Bencana Gunung Semeru Kabupaten Lumajang	107
D. <i>Existing Model</i> Kebijakan Mitigasi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang	112
BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN LUMAJANG	116
A. Arah Manajemen Bencana di Kabupaten Lumajang	116
B. Sinergitas <i>Stakeholder</i> Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Berapi Di Kabupaten Lumajang	129
C. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Mitigasi Bencana Daerah	137

D. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI)	144
E. Implementasi Program Desa Tangguh Bencana	147
F. Program Desa Tangguh di Kabupaten Lumajang ...	154
BAB VI KENDALA IMPLEMENTASI MITIGASI BENCANA GUNUNG SEMERU	157
A. Kondisi Jaringan dan Jalur Komunikasi Wilayah Bencana Kurang Lancar	159
B. Respon Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Penanggulangan Bencana Rendah	166
C. Minimnya Alokasi dan Realisasi Pendanaan dalam Mitigasi Bencana	187
D. Implementasi Program-Program Bencana Berbasis Masyarakat Cenderung Elitis dan Kurang Menyentuh Masalah Mendasar	195
E. Rumusan Proposisi Mayor	201
F. Dialog Teoritis	203
G. Recommended Model	212
BAB VII PENUTUP	215
DAFTAR PUSTAKA	217



**KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA
GUNUNG SEMERU**

BAB I PENDAHULUAN

A. Kesadaran dan Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Bencana sering diidentikkan dengan suatu hal yang terjadi karena alam dan berada di luar kontrol manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)* (2004), bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri. Sementara *Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)* mendefinisikan bencana sebagai “*The serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using their own resources*” (Abarquez dan Murshed, 2004:154). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, bencana mengandung tiga aspek dasar, yaitu: (1) terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*), (2) peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat dan (3) ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan

BAB II

KEBIJAKAN PUBLIK

A. Dinamika Paradigmatik Administrasi Publik

Pada masa dahulu, pemerintah memiliki peran penting sebagai pemegang kontrol utama dalam pelayanan publik (Nielsen et al. 1999:33), kompleksitas dari berbagai kebutuhan masyarakat modern terkadang menjadi sangat sulit teratasi dalam keadaan tersebut. Produk kebijakan dari pemerintah adalah produk kebijakan sarat akan kepentingan dari berbagai kekuatan politik, dimana hal tersebut adalah berkaitan dengan banyaknya tujuan yang dibawa berbagai kekuatan politik yang berkecimpung dalam pemerintahan. Dalam paradigma baru pelayanan publik ini, peran utama pemerintah adalah sebagai pelaku layanan publik dengan fungsi sebagai lembaga kontrol dimana fungsinya adalah sebagai penyedia seperangkat aturan dan rewards bagi beberapa person yang menjadi pelaksana layanan publik dalam koridor yang benar.

Peran pemerintah mengalami pergeseran dari pemegang kontrol utama menjadi pemegang dan penentu agenda kegiatan pelayanan publik, kemudian menentukan pihak mana yang menjadi pelaku layanan publik, memfasilitasi mereka, melakukan negosiasi dan menjadi lembaga perantara antara kebutuhan layanan publik dengan pihak publik, pemilik perusahaan pribadi dan sektor perusahaan *non-profit*. Terdapat tiga paradigma dalam ilmu administrasi Negara baru yang berkaitan dengan paradigma dalam pemberian layanan umum, berikut ini penjelasannya.

BAB III

MITIGASI BENCANA GUNUNG BERAPI

A. Konsep Bencana Gunung Berapi

Menurut UNDP (2012), Bencana Gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1.000 °C. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700-1.200 °C. Letusan gunung api yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Bahaya letusan gunungapi dibagi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya utama(primer) dan bahaya ikutan (sekunder). Kedua jenis bahaya tersebut masing-masing mempunyai risiko merusak dan mematikan.

1. Bahaya Utama (primer)

Bahaya utama (sering juga disebut bahaya langsung) letusan gunungapi adalah bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awanpanas (*pyroclastic flow*), lontaran batu (pijar), hujan abu lebat, leleran lava (*lava flow*), dan gas beracun.

- a. *Awan panas* adalah campuran material letusan antara gas dan bebatuan (segala ukuran) terdorong ke bawah akibat densitasnya yang tinggi dan merupakan adonan yang jenuh menggulung secara turbulensi bagaikan gulungan awan yang menyusuri lereng, selain suhunya sangat tinggi, antara 300-7000C, kecepatan luncurnya-

BAB IV

DESKRIPSI KABUPATEN LUMAJANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang

1. Letak dan Keadaan Geografis

Pembahasan mengenai deskripsi lokasi bertujuan untuk memahami kondisi wilayah yang ditempati oleh suatu masyarakat, sehingga dapat diketahui pola geografis dan sosial suatu masyarakat. Secara geografis Kabupaten Lumajang terletak di bagian timur Propinsi Jawa Timur yaitu Sebelah Barat antara 1080 03' - 1080 19' Bujur Timur, Sebelah Timur 1080 12' - 1080 25' Bujur Timur, Sebelah Utara antara 60 36' - 60 58' Lintang Selatan dan Sebelah Selatan 60 43' - 70 03' Lintang Selatan. Secara administratif batas-batas wilayah kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Jember.
- c. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Secara topografi Kabupaten Lumajang terbagi kedalam 4 daerah yaitu : daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Untuk kategori yang kedua ranuyoso, tempursari, sekitar gunung semeru, sekitar gunung tengger dan lamongan. Kecamatan yang termasuk kedalam kategori yang ketiga adalah Lumajang, Sumpalsuko dan Sukodono. Untuk kategori yang terakhir yaitu Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN LUMAJANG

A. Arah Manajemen Bencana di Kabupaten Lumajang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lumajang pada tanggal 24 Agustus 2013, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu

BAB VI

KENDALA IMPLEMENTASI MITIGASI BENCANA GUNUNG SEMERU

Kebijakan pemerintah di bidang mitigasi tentu menjadi bagian penting dari suatu proses mengenali ancaman bencana yang ada di sekitar tempat tinggal manusia. Ancaman yang tentu saja dapat merenggut harta benda (properti, ladang, dan hewan ternak), keluarga, lingkungan sosial, dan nyawa manusia. Kebijakan mitigasi bertujuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam setiap ancaman bencana yang mungkin akan datang. Tahapan mitigasi bencana adalah bagian dari manajemen bencana sebagai usaha seluruh komponen dari masyarakat baik pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda.

Dalam siklus manajemen bencana terdapat tiga komponen yang dilakukan yaitu kegiatan prabencana, tanggap darurat saat terjadi bencana dan kegiatan pasca bencana. Jika selama ini manajemen bencana lebih menitikberatkan pada aspek penanganan tanggap darurat dan pasca bencana yang ternyata terdapat banyak kelemahan, maka ke depannya manajemen bencana lebih menitikberatkan kegiatan prabencana yaitu kegiatan mitigasi bencana dalam kerangka mengurangi risiko dan dampak bencana.

Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapsiagaan dan tindakan - tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang sudah

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana Semeru di Kabupaten Lumajang belum optimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyebab kurang optimalnya implementasi kebijakan mitigasi bencana Semeru di Kabupaten Lumajang tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Jaringan dan jalur komunikasi bencana alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang kurang lancar dan sinergis sehingga menyebabkan masyarakat cenderung menggunakan pola-pola kearifan lokal dalam mitigasi bencana dibandingkan pola-pola modern karena pola kearifan lokal inilah yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat saat itu.
2. Respon pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana di daerahnya masih kurang sigap dan lamban karena bantuan kepada para korban bencana Gunung Semeru tidak langsung datang saat bencana datang malah yang datang dahulu bantuannya berasal dari lembaga sosial yang ada di dalam maupun luar daerah Kabupaten Lumajang. Bahkan untuk bantuan-bantuan yang di janjikan pun belum ada realisasinya.
3. Kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang tentang alokasi dan realisasi dana mitigasi bencana sangat minim padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Kebencanaan diamanahkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana APBD untuk bidang bencana alam.
4. Pemahaman masyarakat akan bencana masih rendah. Hal ini menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan mitigasi yang selama ini ada kurang optimal. Kondisi ini

- Carter, W. Nick. 1991. *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Manila: ADB
- Creswell, J. W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- CSO - NAD. 2007. *Laporan Kajian Strategis Program Civil Society Organization (CSO)*. Jakarta.
- Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis: And Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita GrahaWidya.
- Dye, T. R. 2008. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson PrenticeHall.
- Ekowati, M. R. C. 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Friedman, Marilyn M. 1998. *Keperawatan Keluarga; Teori dan Praktik*. Jakarta : EGC
- Gsottbauer, Elisabeth dan Van den Bergh, Jeroen C. J. M. 2010. *Environmental Policy Theory Given Bounded Rationality and Other-regarding Preferences*. Springer Science Business Media
- Haifani, 2008, *Manajemen Risiko Bencana (Studi Kasus Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006)*. Jurnal Pusat pengkajian Sistem dan Teknologi Keselamatan
- Hapidah, Nur. 2013. *Pengaruh Program Hijau Bersih dan Sehat Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup*. Jurnal Beraja Inti. Volume 2 Nomor 12
- Henry Mintzberg et al. (1998). *Strategy Safari, A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management* (New York, London, The Free Press)
- ISDR, 2004, *Living with Risk " A Hundred Positive Examples of How People are Making The World Safer"* United Nation Publication, Geneva, Switzerland, 2004.

- Internet. [www.Suara Surabaya.net](http://www.SuaraSurabaya.net) <http://www.wikipedia.com>,
Pemangku Kepentingan, diakses pada tanggal 10 Februari 2010.
- Kerlinger, F. N. 2002. *Asas-Asas Penelitian Behavioral Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kletz. 1993 *Lesson From Disaster: How Organisations Have No Memory And Accident Recur*. Institution of Chemical Engineers: Rugby, England
- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., Hill, M. 2007. *Public Policy Analysis*. Great Britain: The Policy Press University Bristol.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Gava Media
- Mertokusumo, Sudikno. 2000, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Moleong Lexy J, MA, DR, Prof, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit.: PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1988.
- Meter, D. S. V. & Horn, C. E. V. 1975. *The Policy Implementation Process*. Ohio: SAGE Publications, Inc.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Mulyana, Didik S dan Fredy Chandra. 2007. *Perencanaan Simulasi Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Komunitas Dalam Menghadapi Bencana, Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas ke V, Makassar, 5 - 8 Oktober 2009*
- Nasir, Haedar. 2008. *Bencana Dalam Ragam Pandangan (II)*. Majalah Suara Muhammadiyah
- Natori, Nasahiko. 2010. *A Guide Book for Tourism Based Community Development*. Osaka Japan: Publisier APTEC
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Penerbit PT Rinika Cipta, Jakarta
- Neuman, W. L. 1997. *Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches*. Boston: Allyn & Bacon.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2007). *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta

- Nugroho, Riant.D. 2008. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Oppenheim, A.N. 1996. *Questionnaire Design and Attitude Measurement* . New York: Basic Books.
- P. Rizkiyah, L. Liyushiana, and H. Herman, "Sinergitas Penta helix Dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara," J. IPTA, vol. 7, no. 2, p. 247, 2019, doi:10.24843/ipta.2019.v07.i02.p15.
- Patterson, Matthew . 1996. *Green Political dalam Scoot Burchill dan Andrew Linklater* (ed), *International Relation Theory*, New York: St. Martin's Press. Inc, New York
- Patton, M.Q. (2001). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB). 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta
- Purnaweni, Hartuti. 2014. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol. 12 Issue 1: 53-65
- Putri, Dwi.NA. 2011. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Siak (Studi pada Daerah Aliran Sungai Siak Bagian Hilir)*. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1,
- Sadisun, 2004. *Manajemen Bencana: Strategi Hidup Di Wilayah Potensi Bencana*. *Key Note Speaker* Pada Lokakarya Kepedulian Terhadap Kebencanaan Geologi dan Lingkungan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi, Bandung 2-3 Desember 2004
- Sadisun, Imam. 2004. *Manajemen bencana: Strategi hidup di wilayah potensi bencana*. *Key note speaker* pada lokakarya Kepedulian Terhadap Kebencanaan Geologi dan Lingkungan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung 2-3 Desember

- Sarwidi. 2006. *Penanggulangan Bencana Gunung Merapi Berdasarkan Sistem Penanggulangan Bencana Nasional (The Management of Merapi Volcano Disaster Based On The National Disaster Management System)*. Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Merapi: Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana
- Sedarmayanti, 1995. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Ilham Jaya, Bandung
- Sekaran, U. 1992. *Research Methods for Business: A Skill – Building Approach*. New York: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Setiawan. 2011. Kajian Geologi Gunung Merapi. <http://geoinsight.wordpress.com/2010/06/09/kajian-geologi-gunungapi-merapi> [diakses pada 21 Agustus 2013]
- Simonds J. O. 1983. *Landscape Architecture* McGraw -Hill Book Co. New York
- Slamet, Margono, 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, Bogor: IPB Press
- Soerjadi. 1988. *Ilmu Lingkungan*. Penerbit ITB: Bandung
- Soetomo., 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Solahuddin Kusumanegara dan Sofa Marwah, 2006. *Hand Out Mata Kuliah Metodologi Ilmu Politik* (Purwokerto: Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman), hal 22-23
- Subarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto. 2006. *Disaster Management Di Negeri Rawan Bencana*. PT Aksara
- Grafika Pratama : Jakarta. Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulis Setyawan. 2011. *Ironisme Penanganan Bencana di Indonesia*, Rimanews.com, diakses pada tanggal 10 Februari
- Sumekto, Didik Rinan. 2010. *Pengurangan Risiko Bencana Melalui Analisis Kerentanan Dan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana*. Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Merapi : Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana

- Syamsul, Maarif. 2007/2008. *Pedoman Penanggulangan Bencana Banjir*. Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman
- Tearfund, 2006, *Mainstreaming Disaster Risk Reduction, A Tool for Development Organisation*, Tearfund, 100 Church Road, Teddington, Middlesex, TW11 8QE, UK
- Tim Hayward. 1992. *Green Political Theory*, University Of Edinburd, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1996/hayw.pdf> pada tanggal 20 Januari 2015
- Triutomo, Sugeng. 2007. *Pengenalan Karakteristi Bencana dan Upaya Mitigasi di Indonesia. Edisi II*, Bakornas PB, Jakarta
- Tukiyat, Widodo, F. H., & Goenawan, R. D. (2020). *Disaster Risk Mitigation fot Forest and Land Fire Prevention In Sumatera*. SHES: Conference Series 3
- Twigg John. 2007. *Karakteristik Masyarakat Tahan Bencana. DFID Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group*
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Usman, H. dan Akbar, P. S. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT BumiAksara
- Wibawa, S. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Widodo, J. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis ProsesKebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wibawa, S., P dan Pramusinto, A. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- <https://jurnal.uns.ac.id/SHES/article/view/44980>
- <https://setiamengabdi.stialanbandung.ac.id/index.php/stiamengabdi/article/view/7>

TENTANG PENULIS



Dr. Suhari, A.Per.Pen, MM adalah dosen di Universitas Jember yang berkonsentrasi dalam bidang keperawatan komunitas, gerontik dan kebencanaan. Penulis menyelesaikan pendidikan keperawatan di FK Universitas Airlangga tahun 1998, kemudian Magister Manajemen di UNIGA Malang tahun 2004 dan menyelesaikan Doktoral di Universitas Jember tahun 2017. Penulis yang lahir di Blitar 02 Maret 1963 ini selain aktif dalam kegiatan mengajar juga aktif dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur dan organisasi profesi perawat yaitu sebagai ketua DPD PPNI Kabupaten Lumajang serta aktif sebagai tim pengendali mutu dan kendali biaya BPJS. Penulis juga aktif meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.